

BAB III

GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA DAN HASIL KERJA DARI PELAYANAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

3.1 Deskripsi Kementerian Agama Kota Semarang

3.1.1. Sejarah berdirinya

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat, terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah.

Pada abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Budha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkannya ke India.

Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab. Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan,

kerajaan Tidore dan Ternate di Maluku, kerajaan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada gelar "Sampean Dalem Hingkang Sinuhun" sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum.
2. Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar "Sayidin Panatagama Kalifatulah."

Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam gelar raja "Senopati Hing Ngalogo." Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga "mengatur" pelayanan kehidupan beragama. Tentu saja "pelayanan" keagamaan tersebut tak terlepas dari kepentingan strategi kolonialisme Belanda. Dr.C. Snuck Hurgronje, seorang penasehat pemerintah

Hindia Belanda dalam bukunya "Nederland en de Islam" (Brill, Leiden 1911) menyarankan sebagai berikut:

"Sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem (tata negara) Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang baik, sama sekali tidak boleh lalai untuk mengaturnya". Pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan gereja, tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.
2. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasannya kepada para raja, bupati dan kepala bumiputera lainnya.

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu:

1. Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani menjadi wewenang Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran dan Ibadah).

2. Soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lainlain, menjadi urusan Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri).

Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor Islamietische Zaken menjadi wewenang Departement van Justitie (Departemen Kehakiman). Pada masa penjajahan Jepang kondisi tersebut pada dasarnya tidak berubah. Pemerintah Jepang membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat yang berfungsi sama dengan Kantoor voor Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka, kantor agama karesidenan, dengan menempatkan tokoh pergerakan Islam sebagai pemimpin kantor. Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung cita-cita persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia

diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuankemajuan yang akan dicapai. Departemen Agama yang sekarang berganti menjadi Kementerian Agama didirikan pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3.1.2. Visi Dan Misi kementerian agama

1. Visi

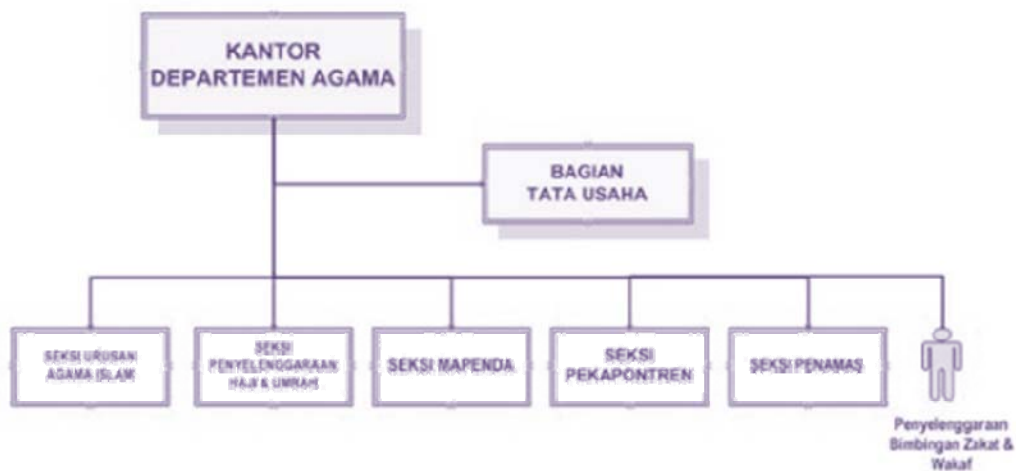
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

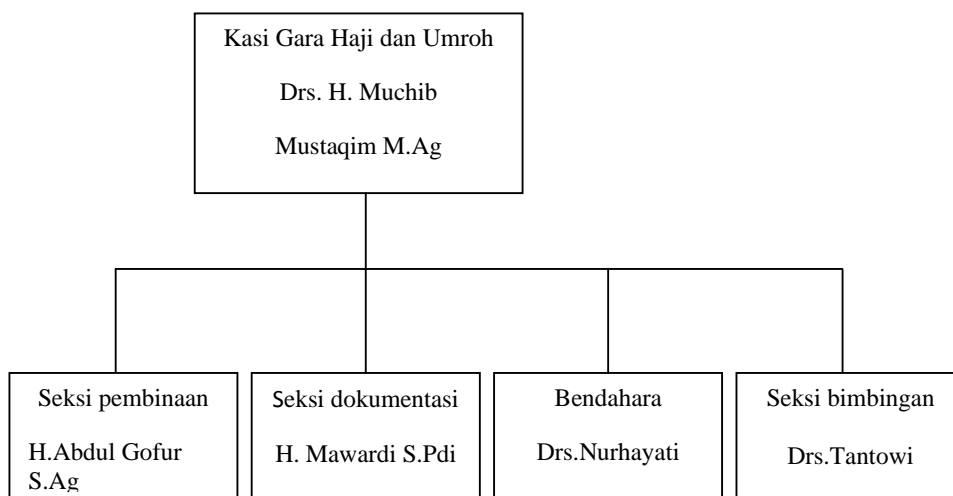
- a. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama;
- b. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan;
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama;
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji;
- e. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan;
- f. Memperkokoh kerukunan umat beragama; dan
- g. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia

3.1.3. Struktur Kepengurusan Kementerian Agama Kota Semarang

Struktur organisasi Kementerian Agama Kota Semarang, secara umum digambarkan sebagai berikut



Bagan struktur seksi penyelenggaraan ibadah haji adalah:



3.2 Deskripsi Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama Kota

Dalam menyelenggaraan ibadah haji, kegiatan kementerian agama meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan calon jama'ah haji di Indonesia. Dalam hal ini, pembinaan meliputi penyuluhan dan pembimbingan calon jama'ah haji, jama'ah haji dan paska haji. Pelayanan meliputi pemeliharaan kesehatan calon jama'ah haji dan jama'ah haji, pelaksanaan angkutan dan cargo barang bawaan jama'ah haji, penyediaan sarana angkutan luar negeri, catering, asuransi dan perbekalan haji. Dan dalam hal ini terdapat penyempurnaan undang-undang yaitu undang-undang no 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah haji pengganti undang-undang no 18 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji mengenai pelayanan ini yaitu Jama'ah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi: pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi, penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji dan pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke Tanah Air.

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jama'ah haji sehingga jama'ah haji menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan

ajaran agama Islam. Undang-undang no 2 tahun 2009 perubahan atas undang - undang no 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Pembinaan dan bimbingan ini tidak dijelaskan secara terperinci, akan tetapi kementerian agama kota selaku penanggung jawab berkewajiban melakukan bimbingan dan pembinaan bagi setiap calon/jama'ah haji. Tugas pembinaan dan bimbingan ini antara lain:

- a) Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji melaksanakan fungsi:
 - Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pembinaan urusan haji
 - Memberikan informasi kepada masyarakat di bidang pelaksanaan ibadah haji.
 - Memberikan bimbingan dan pembinaan urusan haji
 - Melakukan penseleksian dan mengatur tenaga yang dipekerjakan dalam penyelenggaraan haji
 - Membina para petugas penyelenggara, pembinaan pelayanan kepada jama'ah haji.
- b) Kantor wilayah kementerian agama propinsi dalam hal ini bidang/pembimbing urusan haji pada daerah tingkat 1, bertugas memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan haji dan melaksanakan fungsi untuk :

- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di bidang pelaksanaan urusan haji.
 - Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan pemberian bimbingan kepada jama'ah dan petugas haji.
 - Melakukan penyediaan sarana bagi jama'ah haji yang mencakup proses dalam rangka pelaksanaan ibadah haji
- c) Kantor kementerian agama kabupaten/kota madya dalam hal ini penyelenggaraan bimbingan urusan haji pada daerah tingkat II kabupaten/kotamadya bertugas memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan haji pada daerahnya, serta melaksanakan fungsi untuk:
- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di bidang pelaksanaan haji.
 - Melakukan pemberian bimbingan kepada calon jama'ah haji.
 - Melakukan penyediaan sarana dan pra sarana bagi calon jama'ah haji yang mencakup seluruh proses dalam melaksanakan ibadahnya.

3.3 Perencanaan Ibadah Haji Kementerian Agama Kota Semarang

Secara hirarkhis, penyelenggara haji meliputi penyelenggara haji tingkat pusat, penyelenggara haji tingkat propinsi, penyelenggara haji tingkat kabupaten atau kota, penyelenggara haji di Arab Saudi. Penyelenggara tingkat pusat dilaksanakan di Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji. Penyelenggaraan haji tingkat propinsi

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai penanggung jawab dan koordinator, sedangkan pelaksanaan harian dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat sebagai kepala staf penyelenggaraan ibadah haji propinsi, dan dibantu Kabid Penyelenggara Haji sebagai sekretaris. Penyelenggaraan haji tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan oleh bupati atau walikota sebagai penanggung jawab dan koordinator, sedangkan pelaksanaan harian dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama setempat sebagai kepala staf penyelenggaraan ibadah haji kabupaten/kota, dan dibantu Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh sebagai sekretaris.

Diantara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah:

- 1) Melaksanakan pendaftaran dan bimbingan jamaah haji.
- 2) Melaksanakan bimbingan Karu dan Karom sebanyak 1 kali.
- 3) Mengusulkan TPhi dan TPIH
- 4) Mengurus dokumen haji (paspor dan lain-lain)
- 5) Mengurus sarana haji (koper, tas tentengan, buku-buku petunjuk dan manasik haji dan tas paspor)
- 6) Mengadakan bimbingan massal 2 kali dan dilanjutkan bimbingan kelompok 10 kali.
- 7) Mengurus pemberangkatan calon jamaah haji kota Semarang yang tergabung dalam kloter.
- 8) Mengurus pemulangan jamaah haji 1 kali.
- 9) Melaksanakan pendaftaran haji tahun 2012-2015.

10) Mengusulkan mutasi ke daerah lain 2 orang dan mutasi masuk 1 orang

11) Mengurus jamaah haji yang batal dan yang meninggal.

Untuk mempermudah realisasi perencanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji di kota Semarang, kepala kantor kementerian agama kota Semarang juga mengangkat beberapa kepanitiaan ibadah haji, meliputi :

- Kepala Kantor KUA sebagai penanggungjawab pelaksanaan bimbingan manasik haji Kota Semarang.
- Panitia Pelatihan Ketua Regu dan Ketua Rombongan Haji Kota Semarang.
- Panitia pelaksana pemantapan manasik calon haji Kota Semarang.
- Pembimbing dan penanggungjawab manasik haji Kota Semarang.
- Monitoring pelaksanaan bimbingan manasik haji Kota Semarang.

Selaku penanggungjawab, gubernur Kota Semarang juga menetapkan sejumlah keputusan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di Kota Semarang. Beberapa keputusan gubernur tersebut antara lain mengenai :

1. Tim penyelenggara pemeriksaan calon jamaah haji di kota Semarang
2. Biaya jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji kota Semarang.
3. Iuran swadaya gotong royong bimbingan manasik dan pemberangkatan serta pemulangan jamaah haji kota Semarang.

Sebelum pelaksanaan ibadah haji, seksi penyelenggaraan haji dan umroh, merencanakan program pelayanan dan pembinaan haji daerah. Pada tahun 2009 program tersebut antara lain:

1. Rapat koordinasi

Dalam rapat koordinasi pembahasan berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan haji tahun 2009. Rapat koordinasi biasanya dilaksanakan 2 kali.

2. Pelayanan ibadah haji dan umroh

Yang termasuk dalam kegiatan pelayanan ibadah haji dan umroh adalah pelatihan pembimbing manasik haji, pelatihan Karu-Karom dan pendalaman manasik Karu-Karom.

3. Rapat kerjasama dengan instansi terkait

Rapat kerjasama dengan instansi terkait dilaksanakan empat kali, membahas tentang persiapan pemberangkatan dan pemulangan

haji dan umroh. Instansi-instansi terkait yang diajak kerjasama adalah pemerintah kabupaten atau propinsi dan Departemen Penerbangan. Salah satu pembahasannya adalah pengecekan peserta dan paspor.

4. Manasik massal

Kegiatan manasik massal juga dilaksanakan 4 kali, yaitu untuk membimbing dan pendalaman manasik haji bagi calon haji. Hal ini dilaksanakan agar calon haji memahami betul syarat dan rukun ibadah haji dan umroh dan setelah berada di tanah suci dapat melaksanakan kegiatan ibadah haji dan umroh dengan khusyu'.

5. Penyelesaian paspor

Kegiatan penyelesaian paspor dilaksanakan untuk memastikan apakah paspor calon haji sudah beres semua atau belum. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah pengambilan paspor, penempelan photo, pembuatan daftar nominasi dan pengiriman paspor.

6. Penambahan sarana manasik

Kegiatan penambahan sarana manasik yaitu pengadaan sarana kelompok yaitu manasik haji dan umroh dilaksanakan serentak satu kecamatan. Mengenai berapa kali kegiatan ini dilakukan, tergantung dari kesepakatan calon haji. Biasanya dilaksanakan 2

minggu sekali.

7. Penambahan sarana transportasi/sepeda motor

Penambahan sarana transportasi dilakukan untuk perlengkapan persiapan pelayanan haji, yaitu dengan pengadaan sepeda motor.

Pengadaan dilakukan karena seringkali untuk mobilisasi yang sangat padat, sementara sarana terbatas.

3.4 Hasil Kerja Pelayanan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Semarang

Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2009 merupakan masa percobaan dan merupakan keberhasilan bagi kementerian agama kota semarang pada khususnya dan dalam hal ini kementerian agama kota semarang telah berusaha maksimal dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan pada mulai awal kegiatan penyelenggaraan materi bimbingan manasik haji di masing- masing kelompok tingkat kecamatan masing-masing. Bahwa frekuensi dan bimbingan/pemantapan manasik haji oleh pemerintah dalam hal ini kementerian agama dilaksanakan sebanyak dua kali.

Secara operasional, Menteri Agama menetapkan organisasi pelaksana ibadah haji sebagai berikut : (1) Panitia Penyelenggara Ibadah haji (PPIH) Pusat, (2) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)

Embarkasi, (3) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi (4) Petugas Operasional yang menyertai jama'ah haji yang terdiri dari (a) Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIH).

Pada tingkat kementerian agama dalam hal ini kepala seksi penyelenggara haji dan umroh kementerian agama kota Semarang memiliki melakukan tugas pembinaan, pelayanan dan perlindungan pada jama'ah haji pada tahun 2009, berikut rencana pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di kementerian agama kota Semarang tahun 2009:

No	Bulan	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	Januari s/d Desember	-5 Pendaftaran, laporan jumlah haji dan pengolahan dokumen	UPT peny. Haji dan umroh
2	26 Maret 2009	-6 Bimbingan Massal I, kebijakan pemerintah tentang perhajian	Praktek Diconvention Hall Masjid Agung Jawa Tengah
3	15 agustus 2009 - Oktober 2009	-7 Manasik kelompok sebelum pelunasan BPIH	10 x pertemuan di tingkat kecamatan
4	02 Juni-30 Juni 2008	Diperkirakan pelunasan BPIH	

5	01 Juli- Agustus 2009	-8 Bimbingan Massal II, pembentukan Karu, Karom dan Pramanifes/Kloter (sementara)	5 x pertemuan di tingkat kecamatan
6	Agustus 2009	-9 Cheking kesehatan haji I	Di Puskesmas kecamatan masing-masing
7	01-30 Sept 2009	-10 Puasa Ramadhan 1430 H	
8	27 September 2009	-11 Bimbingan Massal III, Pelatihan Karu, Karom dan Kloter -12 Ceking kesehatan thp II -13 Pengambilan tas haji -14 Penyelesaian buku paspor haji	Kankemenag Semarang -15 Kemenkes -16 Kanwil -17 Kankemenag semarang
9	4 Okt 2009	-18 Bimbingan Massal IV, Konsolidasi kloter/ Manasik massal terakhir	Di Pusatkan Di Islamic Center Cemarang
10	2 Nop 2009	-19 Diperkirakan pemberangkatan jamaah calon haji kloter pertama	PPIH Donohudan

11	Nop 2009	-20 Pelepasan/pamitan jamaah calon haji kota Semarang tahun 2009	Di Masjid Agung Jawa Tengah(MAJT) Semarang
12	Akhir Desember 2009-Januari 2010	-21 Pemulangan jamaah haji Kota Semarang tahun 2009 -22 Tasyakuran jamaah haji Kota Semarang tahun 2009	Di Masjid Agung Jawa Tengah(MAJT) Semarang

Adapun sistem penyelenggaraan dan pelayanan haji dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pelayanan administrasi dan dokumen

Dalam hal ini pelayanan administrasi ataupun dokumen terkait penyelenggaraan ibadah haji yaitu kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai tempat pendaftaran dengan menyediakan berbagai formulir yang harus diisi oleh calon jama'ah haji. Bank penerima setoran BPIH dilakukan dengan sistem tabungan terbuka sepanjang tahun dan pelunasan BPIH dilakukan setelah BPIH ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Puskesmas sebagai instansi yang melakukan pemeriksaan kesehatan awal untuk persyaratan pendaftaran haji. Proses pendaftaran haji juga terhubung secara langsung dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji dan Kantor Wilayah Departemen

Agama Propinsi melalui jaringan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dengan Siskohat ini perkembangan pendaftaran haji seluruh Indonesia dapat diketahui setiap waktu.

Disamping itu pada tahun 2009, pelaksanaan paspor haji masih juga menjadi tugas dari kementerian agama kota Semarang dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji

b. Bimbingan Haji

Sebagaimana dijelaskan pada bab tiga sebelumnya bahwa bimbingan haji ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- Bimbingan ibadah haji missal
 - o 1 kali bimbingan manasik haji massal dan musyawarah
 - o 1 kali bimbingan manasik haji massal dan penglepasan
 - o 1 kali bimbingan manasik haji pembentukan Karu(ketua regu) dan Karom(ketua rombongan)
 - o 1 kali bimbingan manasik haji pembekalan Karu dan Karom

Dalam proses ini kementerian agama sangat berperan aktif dalam memberikan pengarahan kepada para calon Jama'ah Haji tentang manasik Haji. Akan tetapi, masih ada calon Jama'ah Haji yang ikut bimbingan manasik haji yang didirikan oleh lembaga keagamaan, perorangan, atau yayasan yang bertujuan memberikan bekal kepada

calon haji ketika masih berada di Tanah Air dan bimbingan sampai ke Tanah Suci. Bimbingan yang dilakukan oleh lembaga di luar kementerian agama kota memang sangat perlu, karena akan memberikan keleluasaan calon haji dalam membentuk kelompok, melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, dan waktu manasik yang relatif lama sehingga mampu melaksanakan ritual haji secara mandiri.

Dalam bimbingan Manasik Haji ini, memang di harapkan membentuk adanya Karu (Ketua Regu) dan Ketua Rombongan (Karom) agar mempermudah dalam pelaksanaan koordinasi pada saat di tanah suci.

- Bimbingan calon jama'ah haji

Bimbingan ini dilaksanakan disetiap kecamatan dan dilaksanakan tiap 1 minggu 2 kali.

Sedangkan realisasi pelaksanaan pembekalan terhadap jama'ah calon haji kota semarang tahun 1430 H/2009 M dilakukan sebanyak 4 kali massal dan 10 kali manasik kelompok meliputi:

- Bimbingan massal dilaksanakan empat kali
- 10 kali bimbingan manasik kelompok (teori) di KUA kecamatan

Adapun jadwal sebagai berikut:

Hari/tanggal	Materi	Keterangan
Sabtu,15 Agustus 2009 Pk 08.00-11.30 WIB	Panduan perjalanan haji 1. Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan haji/perjalanan haji 2. Kegiatan di tanah air 3. Kesehatan dalam ibadah haji	Di kecamatan masing-masing
Sabtu, 15 agustus 2009 Pk 13.00-16.30 WIB	1. Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan haji/perjalanan haji 2. Kegiatan di arab Saudi 3. Kesehatan dalam ibadah haji	Di kecamatan masing-masing
Ahad, 16 Agustus 2009 Pk 08.00-11.30 WIB	1. Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan haji/perjalanan haji bimbingan manasik haji 2. Akhlakul karimah 3. Adat istiadat bahasa arab	Di kecamatan masing-masing
Ahad, 16 Agustus 2009 Pk 13.00-16.30 WIB	1. Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan haji/perjalanan haji bimbingan manasik haji 2. Niat haji dan umroh	Di kecamatan masing-masing

	3. Thawaf	
Sabtu, 26 september 2009 pk 08.30-11.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan haji/perjalanan haji 2. Sa'i 3. Wukuf di arafah 4. Kesehatan dalam ibadah haji 	Di kecamatan masing-masing
Sabtu, 26 September 2009 Pk 13.00-16.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan haji/perjalanan haji 2. Mabid di mina dan lontar jumrah 3. Tawaf ifadah dan wada' 	Di kecamatan masing-masing
Ahad, 27 September 2009 Pk 08.30-11.30 Wib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan haji/perjalanan haji 2. Tawaf dan sa'i 3. Wukuf di arafah dan lontar jamarot 4. Kesehatan dalam ibadah haji 	Praktek dipusatkan di Islamic center manyaran Membawa kain ihram
Ahad, 27 September 2009 Pk 13.00-16.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan haji/perjalanan haji 2. Thawaf dan sa'i 3. Wukuf di arafah dan 	Praktek dipusatkan di Islamic center manyaran Membawa kain ihram

	lontar jamarot 4. Kesehatan dalam ibadah haji	
Sabtu, 03 Oktober 2009 Pk 08.30-11.30 Wib	1. Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan haji/perjalanan haji 2. Hikmat ibadah haji 3. Kesehatan dalam ibadah haji	Di kecamatan masing-masing
Ahad, 04 Oktober 2009 Pk 08.30-11.30 Wib	1. Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan haji/perjalanan haji 2. Pelestarian haji mabrur 3. Kesehatan dalam ibadah haji.	Di kecamatan masing-masing

- Pembimbingan/pembinaan pasca haji

Tujuan penyelenggaraan bimbingan haji pasca pelaksanaan ibadah haji adalah untuk menjaga kemabruran yang diperoleh jama'ah setelah menunaikan ibadah haji. Kemabruran diterjemahkan dengan senantiasa meningkatkan amal shalih, memperbanyak ibadah, dan memperbanyak silaturahmi.

Dalam hal ini, kementerian agama kota semarang mengadakan beberapa kegiatan. Adapun bentuk kegiatan pembinaan melalui

rombongan antara lain meliputi : kegiatan pengajian secara keliling di rumah-rumah mantan jama'ah, melakukan arisan haji

- Penyedia konsumsi

Dalam hal ini, kementerian agama kota Semarang tahun 2009 telah menyediakan konsumsi sewaktu pelaksanaan bimbingan manasik haji ataupun pelatihan manasik haji yang selama penyelenggaraan ibadah haji dengan dana yang berasal dari BPIH. Konsumsi ini berupa snack, makanan ringan ataupun makan siang untuk jama'ah haji sewaktu kegiatan berlangsung.

- Pelatihan Ketua Regu dan Rombongan (Karu dan Karom)

Ketua regu (karu) dipilih dari pengelompokan karom (ketua rombongan) yang terdiri dari 10/11 orang, sedangkan karu sendiri terdiri dari kelompok karom yang terdiri dari 45/50 orang. Dalam hal ini karu dan karum perlu dibimbing dalam rangka mamantapkan manasik dan pembentukan regu dan rombongan, dan sekaligus pembentukan kloter.

Adapun materi pelatihan meliputi:

1. Kebijakan pemerintah dalam operasional penyelenggaraan haji

2. Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas ketua Regu dan Rombongan
3. Bimbingan manasik haji
4. Bimbingan Kesehatan

- Pelatihan Petugas Haji

Untuk memberikan pelayanan kepada jama'ah haji sampai Indonesia, maka dalam tiap kloter terdapat petugas haji yang terdiri dari seorang pemandu haji yang disebut tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPHI) dan tiga tim kesehatan yang disebut tim kesehatan haji indonesia (TKHI). Adapun petugas *non* kloter atau panitia penyelenggara haji (PPIH) Arab saudi.

Sebelum melaksanakan tugas, kepada mereka diberikan pelatihan-pelatihan untuk memahami dan mendalami tugas masing—masing

c. Layanan Kesehatan

Dalam pelaksanaan ibadah haji dikoordinir oleh rumah sakit didaerah sebagai koordinator layanan kesehatan ibadah haji dan tingkat puskesmas untuk wilayah kecamatan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji.

d. Penyediaan akomodasi dan transportasi

Penyediaan akomodasi dan transportasi ini diwujudkan dengan proses pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji Jawa Tengah mulai dari Asrama Haji Donohudan sampai kembali lagi dikoordinasikan oleh PPIH Embarkasi/Debarkasi yang diangkat oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji atas usulan Kepala Kantor Wilayah selaku kepala Kantor Wilayah Emigrasi. Selanjutnya PPIH Embarkasi mengangkat petugas pembantu/satgas PPIH. Jumlah kepanitiaan dan satgas sesuai kebutuhan dana diambilkan dari berbagai instansi yang terkait meliputi kementerian Agama, Pemerintah Propinsi, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan sebagainya.

Sebanyak 2.295 calon jamaah haji asal Kota Semarang diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka akan diberangkatkan dalam dua gelombang, terdiri atas 8 kelompok terbang (kloter). Seluruh jama'ah haji kota Semarang tahun 2009 di berangkatkan dari Masjid Agung Jawa Tengah, Jl Gajah Raya Semarang. Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan keamanan menjelang pemberangkatan, ketelibatan semua pihak tetap dibutuhkan antara lain: Poltabes, Koramil, Padwal, Polres, Polsek, Badan Pengelola MAJT, Ambulance, Rapi, dll. Disamping itu, untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi, maka dilakukan penertiban bagi para pengantar. Karena berdasar pengalaman di lapangan pada tahun-tahun lalu, masih terjadi kasus menimpa pada jama'ah dan pengantar. Kasus kehilangan masih

mewarnai masa pemberangkatan dan beberapa peristiwa pencopetan.

Pemberangkatan haji kota semarang di masjid agung jawa tengah tahun ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, hal tersebut tentunya tidak lepas dari kerjasama yang baik dan lancar dari semua pihak. Adapun petugas keamanan yang dilibatkan di setiap kloter antara lain:

- a) Koramil sebanyak 10 orang
- b) Polsek kec sidodadi sebanyak 20 orang
- c) Polres semarang timur sebanyak 5 orang
- d) Keamanan, satpam dan petugas kebersihan lingkungan Msjid agung jawa tengah sebanyak 35 orang
- e) Dinas kesehatan(ambulance) 5 orang
- f) RAPI 20 orang
- g) Pendamping dari kementerian agama 1 orang setiap bis pada setiap kloter